

PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP DAN UNDANG- UNDANG KHUSUS DI INDONESIA



**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

EVI APRIATIN

NPM : 5116500261

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

**PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TINDAK
PIDANA MENURUT KUHAP DAN UNDANG-
UNDANG KHUSUS DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

EVI APRIATIN

NPM : 5116500261

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHP
DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA**

EVI APRIATIN

NPM : 5116500261

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 24 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Siswanto, S.H., MH
NIDN. 0013126401

Tiyas Vika Widyastuti, S.H., MH.
NIDN. 0619058703

Mengetahui,
Dekan



Dr. Achmad Urwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

PENGESAHAN

**PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHP
DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA**


EVI APRIATIN

NPM : 5116500261

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh:

Tegal, 24 Agustus 2020

Penguji I



H. Toni Haryadi, S.H., M.H
NIDN. 0020045801

Penguji II



Soesi Idayanti, S.H., M.H
NIDN. 0627086403

Pembimbing I



Siswanto, S.H., M.H
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.
NIDN. 0619058703

Mengetahui,
Dekan



Dr. Achmad Lirwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi Apriatin
NPM : 5116500261
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 21 April 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TINDAK
PIDANA MENURUT KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 24 Agustus 2019

Yang menyatakan



Evi Apriatin

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis dari pengaturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHP dan perundang-undangan khusus di Indonesia serta implikasi yuridis perkembangan alat bukti tersebut.

Jenis penelitian adalah hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan normatif/juridis berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis non statistik yang dilakukan dengan kualitatif, berupa analisa isi terhadap data-data yang dihasilkan dalam penelitian dan menjabarkannya secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan alat bukti pada pembuktian tindak pidana telah mengalami perkembangan dengan dipengaruhi berbagai faktor. Limitasi dari KUHP dalam pengaturan mengenai alat bukti pada Pasal 184 membatasi perkembangan alat bukti, sehingga perkembangan alat bukti terikat pada pasal tersebut. Sedangkan pengaturan perkembangan alat bukti pada perundang-undangan khusus bersifat *Lex Specialis derogat lex generali* terhadap KUHP maka hanya dapat digunakan pada undang-undang khusus yang mengaturnya. Implikasi yuridis penelitian ini adalah pengaturan pada perundangundangan khusus hanya mengikat pembuktian tindak pidana bagi tindak pidana khusus yang diaturnya saja. Kemudian pengaturan mengenai alat bukti yang masih belum jelas diatur pada KUHP, pelaksanaannya hanya didasarkan pada kebiasaan praktek persidangan dan yurisprudensi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi, dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancaksakti Tegal.

Kata Kunci : Alat bukti, Tindak pidana, Undang-Undang, KUHP.

Abstract

Indonesia is a legal state, thus affirmed in article 1 paragraph (3) of the Constitution 1945. As the logical consequence of the arrangement, the whole life of society, nation and state in Indonesia must be guided to the legal norms.

. The writing of Law (thesis) aims to know and examine the development of evidence tools on the Proof of Criminal act in the provisions of KUHAP and special legislation in Indonesia and the juridical implications of the development of the evidence tool.

The writing of the Law (thesis) includes a type of doctrinal/normative legal research with a normative/juridical approach in the form of a legal approach and comparative approach. The data used in this legal writing is secondary data, both the primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal materials. The data collection techniques in the writing of this Law are literature studies or document studies. The data analysis technique used by the authors is a qualitative non-statistical analysis technique, which is a content analysis of the data generated in the research and is a descriptive of it.

Based on the writing of this law, the result that the evidence tool in the crime-proving has undergone development by being influenced by various factors. The limitation of KUHAP in the arrangement regarding the evidence tool in article 184 limiting the development of evidence tools, so that the development of evidence tools.

Tied to the article. While the development of evidence tools on the Perundangan-undangan special is the Lex Specialis derogat Lex generali to the criminal CODE can only be used on special laws that set it up. The juridical implication of this research is the arrangement in a special invitation only to bind a criminal offence to a special criminal act in which it is located. Then the arrangement of the evidence is still not clearly regulated by the criminal CODE, the implementation is based solely on the practice of trial and jurisprudence.

Keyword: Evidence, Crime, Law, KUHP.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada keduaorang tua dan keluarga tercinta Papah, Alm. Mamah, Kakak- kakakku danAnggih Trio Pangestu dari ketulusanya hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak pernah habis. Serta untuk teman-teman terdekatku yang telah mendukung dan memberikan suport.

MOTTO

1. “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
sabar”
(Al- Baqarah:153)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa' Ta'ala. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah di targetkan. Terkhusus kepada keluarga yang telah memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu tawakal serta menjaga penulis dengan doa yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yang selalu memberikan semangat dan doa serta bantuan moril maupun materil kepada penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk saat ini hanya ucapan terimakasih yang mampu penulis haturkan.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan

Studi Strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul :**“PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHPADAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA”**.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengahaturkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal beserta Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Dr. Sanusi S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Imam Asmarudin S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I (satu) dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis selama tiga tahun sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1.

10. Staff Tata Usaha dan Petugas Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sabar dan ramah.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak/Ibu serta rekan-rekan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Tegal, 24 Agustus 2020

Evi Apriatin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti Dan Sistem Pembuktian	17
1. Pengertian Alat Bukti	17
2. Pengertian Pembuktian.....	24
3. Sistem Pembuktian.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Khusus.....	30
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.....	30
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah Undang-Undang	

3. Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	34
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.....	36
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	38
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan mengenai alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang undangan khusus di indonesia.....	42
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan alat bukti.....	43
a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.....	43
b. Perkembangan Kejahatan dan Modus Operandi.....	44
c. Masyarakat.....	45
2. Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP.....	47
3. Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan khusus tersebut.....	50
B. Implikasi Yuridis Perkembangan Alat Bukti dalam KUHAP dan Perundang-undangan Khusus diIndonesia.....	61
BAB IV PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai konsekuensi logis dari pengaturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut, khususnya hukum publik adalah keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹.

Pelaksanaan dan penegakkan norma-norma hukum saat ini dihadapkan pada kejahatan dalam perkembangan zaman, maka akan terpengaruh dan mengalami perubahan. Khususnya pada era globalisasi ini yang berpengaruh besar pada tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat, serta akan memunculkan adanya norma-norma dan nilai-nilai baru di masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan teknologi. Salah satu teori bidang kriminologi menyebutkan bahwa kejahatan itu merupakan deskripsi perkembangan masyarakat². Begitu masyarakat berhasil memproduksi kemajuan teknologi, maka seiring dengan itu akan timbul pula dampak

¹Alfina Fajrin, <https://www.kompasiana.com/>, diakses pada tanggal 12 september 2017 pukul 23.33 WIB

² Teori-teori tentang kejahatan dan penyebabnya, <https://tugas-makalah.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 7 mei 2013 pukul 02.18 WIB

negatif berupa kemajuan di bidang kejahatan.

Kejahatan seiring dengan kemajuan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal kejahatan sering lebih maju dibanding kenyataan yang dicapai masyarakat, dan terlebih terhadap penegakkan hukumnya, baik dalam hal peraturan hukum materiil maupun formilnya. Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan *transnational*, *extraordinary crime* hingga kejahatan *transborderless* dan lahirnya modus operandi baru kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan oleh kejahatan akan semakin besar.

Guna penegakan hukum kejahatan- kejahatan yang sudah sangat maju tersebut, pengaturan hukum dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht* dan berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, tentunya sudah sangat tidak memadai, sehingga mendorong dirumuskannya perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik

³ N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm 133

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dan lain-lain.

Lahirnya perundang-undangan khusus tidak hanya sebagai suatu bentuk usaha pembaharuan terhadap hukum materiil. Hal ini juga terkait dengan hukum formil. Misalnya pada Undang-Undang anti terorisme yang mengatur hukum materiil tentang terorisme dan juga hukum formil yang mengatur mengenai masa penahanan yang lebih panjang dari yang diatur dalam KUHAP. Bentuk penyimpangan hukum formil tersebut masih pada tahap yang sederhana karena tetap menggunakan KUHAP sebagai peraturan umumnya, yaitu pada perundang-undangan khusus yang sudah mengatur hukum acara tersendiri bersifat *Lex Specialis derogat lex generali* terhadap KUHAP⁴. Namun sudah ada beberapa perbedaan terutama dalam hal pembuktiannya dan alat bukti, misalnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 yang sudah mengakui mengenai alat bukti dokumen dan bukti elektronik yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP.

Baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum. Namun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan

⁴ Ilman Hadi S.H <https://www.hukumonline.com/>, di akses pada tanggal 14 maret 2013 pukul 09.30 WIB

penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditemukan dalam proses pembuktiannya.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs krachts* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁵

Permasalahan yang secara umum terjadi dalam penanganan kasus kejahatan berbasis teknologi informasi kejahatan *transnational*, *extraordinarycrime* dan *transborderless* adalah masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam hukum pidana konvensional tidak mengenal bukti-bukti elektronik seperti *e-mail*, *digital file*, *electronic file* dan lain-lain.⁶ Oleh sebab itu dalam pengaturan perundang-undangan khusus yang

⁵ TB. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, Bandung : MQS Publishing dan AYYCCS GROUP, 2006, hlm 24

⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2005, hlm 10

baru sudah diadopsi beberapa alat bukti seperti elektronik maupun dokumen yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP.⁷

Pengaturan tersebut ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang baru saja sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan 21 April 2008 lalu.⁸

Undang-Undang ini merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 251

⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm 25-26

perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini adalah *cybercrime* dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Permasalahan yang tetap ada, walaupun telah diundang-undangkannya berbagai perundang-undangan khusus adalah mengenai penegakkan hukum yang masih murni berpegang pada KUHAP.⁹

Perkembangan kejahatan dan modus opernadi yang digunakan, melahirkan bukti-bukti baru dalam praktek persidangan dan melahirkan perkembangan tersendiri terhadap alat bukti yang sudah ada. Banyak aspek yang mempengaruhi hal tersebut, dan perkembangan tersebut tentunya akan terus ada sejalan dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut cukup menyulitkan saat terbentur pada pengaturan hukum yang belum berkembang dan masih terikat pada perundang-undangan yang dirasa belum memadai, dan tentunya akan menimbulkan pengaruh pada proses penegakan hukum juga.

Berlatar belakang dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih jauh mengenai mengenai perkembangan alat bukti dalam Penulisan Hukum yang berjudul : **“PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA”**

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. EdisiKedua*. Jakarta :Sinar Grafika, 2008, hlm, 273

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penulisan hukum karena dengan adanya perumusan masalah, berarti penulis telah mengidentifikasi persoalan yang hendak ditulis. Selain itu adanya perumusan masalah akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan menghindari adanya data yang tidak diperlukan sehingga penulisan akan lebih terarah dan sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok- pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam KUHAP dan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitiannya yang tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penulisan ini, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia.

- 2 Untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam KUHAP dan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu kejelasan dan keterarahan informasi yang memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan pengetahuan pada setiap akademisi di bidang hukum maupun masyarakat umum.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa referensi dari jurnal, adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dibawah ini adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Relevansi alat bukti informasi elektronik dalam

hukum acara pidana di indonesia”. Yang di tulis pada tahun 2018, oleh Abdul Kadir, Yakni mahasiswa dari fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang mengatakan bahwa Pembuktian memegang peranan yang sangat penting sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang pembuktian. Berbeda dengan skripsi penulis yang tidak memperluas alat bukti termasuk kategori *documentary evidence*¹⁰.

2. Skripsi yang berjudul “Permasalahan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia” Yang di tulis pada tahun 2016 oleh Ari Dwi Wicaksono, Yakni mahasiswa dari fakultas Hukum Universitas Negeri Jakarta mengatakan bahwa perkembangan implementasi teknologi sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan komputer, Akan tetapi penulis mengatakan perkembangan implementasi teknologi di timbulkan dari tatanan sosial dan sistem nilai yang baru.¹¹.
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap alat bukti dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang”. Yang di tulis pada tahun 2016, oleh Cipto Sanjaya, Yakni mahasiswa dari fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta mengatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut TPPU) adalah

¹⁰Abdul Kadir, *Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Skripsi. Tangerang:Universitas Muhammadiyah Tangerang.2018

¹¹Ari Dwi Wicaksono, *Permasalahan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia*, Skripsi. Jakarta :Universitas Negeri Jakarta. 2016

modus pelarian sejumlah uang dari hasil kejahatan. Berbeda dengan skripsi penulis yang dimana dalam penelitiannya dititik beratkan mengenai alat bukti dan perkembangannya yang ditinjau secara yuridis dalam penanggulangan TPPU.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang perkembangan alat bukti pada tindak pidana dan pengaturannya pada KUHAP dan peundang- undangan khusus. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹³

¹² Cipto Sanjaya, *Tinjauan yuridis terhadap alat bukti dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2016

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan latar ilmiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Khususnya untuk penelitian hukum, selain pendekatan yang bersifat kualitatif, pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis merupakan gabungan dari pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*)¹⁴. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan Undang-undang yang sudah ada ataupun putusan pengadilan dalam kasus yang sama. Pendekatan Undang-undang yang dilakukan dalam penulisan hukum ini berupa penelaahan Undang-Undang dan regulasi lain mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian pidana di Indonesia. Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan dan Undang-undang yang mengatur mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian pidana di Indonesia.

¹⁴ Petter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana ,2011, hlm. 35

3. Sumber Data

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang penulis gunakan dalam hasil penulisan hukum ini meliputi :

1. Hasil penelitian kalangan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana, hukum pembuktian, alat bukti baik pada perundang-undangan khusus maupun KUHAP.
2. Hasil karya kalangan hukum, baik dalam bentuk buku ataupun bentuk literatur lainnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, hukum pembuktian, alat bukti baik pada perundang-undangan khusus maupun KUHAP.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam hasil penulisan hukum ini meliputi :

1. Kamus Hukum.
2. Bahan literasi dari media Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting yang diperoleh dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat¹⁵.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data untuk menjadi suatu laporan sangat memerlukan suatu analisa data yang tepat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa isi atau disebut juga dengan

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

content analysis. Maksud dari teknik ini adalah bentuk analisis yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam penelitian, sehingga dapat mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar. Kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah menguraikan dan menganalisis data yang didapat mengenai perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan hukum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian ini dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai alat bukti dan sistem pembuktian

kemudian tinjauan umum pembuktian dalam perundang-undangan khusus.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang meliputi : pertama, pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia. Kedua, implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam KUHAP dan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran yang didasarkan pada kesimpulan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti dan Sistem Pembuktian

1. Alat Bukti

Definisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁶

Sistem hukum pembuktian di Indonesia mengenal berapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori *oral evidence*, *documentary evidence*, *material evidence* dan *electronic evidence*. Berikut pembagian pada masing-masing kategori:

1) *Oral evidence*

- a) perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah)
- b) pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa)

2) *documentary evidence*

- a) perdata (surat dan persangkaan)
- b) pidana (surat dan petunjuk)

¹⁶ Hari Sasangka, *Loc.cit*, hlm. 11.

3) *material evidence*

- a) perdata (tidak dikenal)
- b) pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus)

4) *electronic evidence*

- a) konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. konsep ini tidak dikenal di Indonesia.
- b) konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*.
- c) pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas alat bukti yang termasuk kategori *documentary evidence*.¹⁷

Beberapa ketentuan hukum acara pidana telah mengatur mengenai beberapa alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 295 HIR yang menyebutkan : sebagai bukti menurut undang-undang hanya diakui :

- 1) Kesaksian-kesaksian
- 2) Surat-surat
- 3) Pengakuan
- 4) Isyarat-isyarat

¹⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 100-101.

Dalam HIR yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah empat macam alat bukti yang disebutkan dalam pasal ini. Sedangkan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan “Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa”.

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.¹⁸ Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi “keterangan terdakwa”.

Berikut ini adalah uraian mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP¹⁹ :

1) Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Pengertian keterangan saksi terdapat pada pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi

¹⁸ Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm.19

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11

adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu²⁰.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:

- a) apa yang saksi lihat sendiri;
- b) apa yang saksi dengar sendiri
- c) apa yang saksi alami sendiri

Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).

2) Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

²⁰*Ibid*, hlm. 16

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli dan keterangan saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut.²¹

Sesuai keterangan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat”. Apabila keterangan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat. Contoh yang paling baik

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.269

mengenai kedua hal tersebut diatas adalah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter²².

3) Surat

Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan;
- tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak

²²M.YahyaHarahap, *Op.cit*, hlm. 278

pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

5) Keterangan Terdakwa

Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHP. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh alat bukti lain. Hal ini mengingatkan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya, tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji. Karena keterangan terdakwa bukanlah pengakuan terdakwa, maka ia boleh menyangkal

segala tuduhan karena ia tidak disumpah. Penyangkalan terdakwa adalah hak terdakwa dan harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan alat bukti²³.

2 Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan, dari membuktikan, secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁴ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁵

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk

²³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.* hlm. 16

²⁴ Anshoruddin, *Op.cit.* hlm. 25

²⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 273

menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁶

3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²⁷

Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian sebagaimana berikut ini :

- a) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction in Time*)

Ajaran pembuktian *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata.²⁸ Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Tidak menjadi masalah keyakinan hakim tersebut diperoleh dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya saja dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Kesan hakim sangat subjektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi putusan hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Padahal hakim sendiri yakin hanyalah seorang manusia biasa, tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinan tersebut. Seseorang

²⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.* hlm. 10

²⁷ *Ibid*, hlm. 11

²⁸ *Ibid*, hlm. 14

bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, dan dapat pula seseorang dibebaskan dari dakwaan meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Sistem pembuktian *conviction in time* dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

- 1) Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*Positief Wettelijke Bewijs theorie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang positif atau lebih singkatnya sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.²⁹

Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time*. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini, undang-undang ditetapkan secara limitatif alat-alat bukti mana yang boleh dipakai hakim. Cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah

²⁹*Ibid*, hlm. 16

seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti.

Menurut D. Simons, sistem pembuktian menurut undang-undang positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hukum secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hati nurani hakim tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Teori ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkuisitor dalam acara pidana. Hakim di sini seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hakim hanya sebagai suatu alat pelengkap pengadilan saja.³⁰

2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Raisonnee*)

Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan

³⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 247

menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar dapat diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang diambilnya³¹.

3) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
(*Negatief Wettelijke Stelsel*)

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim.³²

Sistem pembuktian negatif ini mengenal 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- a) *Wettelijk*: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

³¹*Ibid*, hlm. 16

³²M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 278

- b) Negatif: adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut meyakini kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in time*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.³³

Jika kita membaca isi Pasal 183 KUHP secara tersurat “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*”

³³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.* hlm. 16

B. Tinjauan Umum Pembuktian dalam Perundang-Undangan Khusus

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara/ delik korupsi lolos dari jaring pembuktian sistem KUHAP. Karena itu, pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia. Upaya pembentuk undang-undang ini dalam pemberantasan korupsi adalah dengan penerapan dua sistem pembuktian yaitu pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.³⁴

Istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat, dari sisi bahasa dikenal sebagai *omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof* yang bila diterjemahkan secara bebas

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Jakarta: Pradnyaparamita, 2004 hlm. 107

menjadi “pembalikan beban pembuktian”³⁵. Secara global merupakan suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalis terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal awam dengan istilah “pembuktian terbalik”.

Pendapat Andi Hamzah, sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik”. Tanpa meletakkan kata “beban” maka makna yang terjadi akan berlainan. Pembuktian terbalik tanpa kata beban dapat ditafsirkan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa sehingga secara harfiah hanya melihat tata urutan alat bukti saja.³⁶

Sistem beban pembuktian khusus pada kasus Korupsi berupa sistem pembuktian terbalik sebagian yang terletak pada Terdakwa, sementara sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum³⁷. Masalah beban pembuktian sebagai bagian dari Hukum Pidana Formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

³⁵*Ibid*, hlm. 18

³⁶ Arief Yahya <http://clickhukum.com/>, diakses pada tanggal 15 April 2008 pukul 20.00 WIB

³⁷ AdilLSM, Pengetahuan Tentang Hukum <https://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.html>, , di akses pada tanggal 21 januari 2011 pukul 09.42 WIB

Sesuai dengan Pasal 26 yang menyebutkan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, dengan demikian sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana korupsi bersifat *lex specialis derogat lex generalis* terhadap KUHP. Pengaturan mengenai pembuktian terbalik terdapat pada Pasal 37A, yang pada ayat 1 menyebutkan “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan”. Sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak

berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata “berimbang”, diartikan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *output*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *output* tersebut misalnya berwujud rumah, mobil saham, adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan³⁸.

Pengaturan mengenai alat bukti pada perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada Pasal 26 A Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 26 A : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf,

³⁸Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 76

tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur perihal beracara menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang ini”, dengan demikian sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang bersifat *lex specialis derogat lex generalis* terhadap KUHP.

Hal khusus dalam tindak pidana pencucian uang salah satunya adalah penggunaan sistem pembuktian terbalik terbatas. Undang-undang menyatakan, “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pembuktian pada tingkat pengadilan dilaksanakan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikenakan kewajiban pembuktian terbalik, tetapi hanya pada tingkat pengadilan, bukan pada tingkat penyidikan atau

penuntutan. Hal khusus ini tidak terdapat dalam KUHAP, di dalam Pasal 66 KUHAP dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian³⁹.

Masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks, hal ini jelas disadari oleh penyusun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena modus dan sistem kejahatan yang dipraktikkan oleh para pelaku pencucian uang sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang begitu canggih mulai dari instrumen teknologi yang bersifat manual seperti telepon, telegram, faksimili, rekaman, fotokopi dan lainnya, hingga kepada instrumen yang *extra sophisticated* atau super canggih. Seperti dalam hal penggunaan dunia maya seperti internet, *e-mail*, *electronic banking*, dan lain-lain ragam dunia *cyber* yang dapat digunakan sebagai alatcanggih dalam pencucian uang yang juga dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan.⁴⁰

Pasal 38 : alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ;dan

³⁹http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_8.pdf

⁴⁰ N.H.T Siahaan, *Hukum konsumen : perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk*, Jakarta : Panta Rei, 2005, hlm. 40

3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7

Pasal 1 angka 7 : dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar ;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Senada dengan perundang-undangan khusus lain yang sudah mengatur hukum acaranya sendiri, undang-undang ini dalam Pasal 25 ayat (1) menyebutkan *”penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.”* Dengan

demikian sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana terorisme juga bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan KUHAP.

Kompleksnya pembuktian dan rumitnya modus operandi dari tindak pidana ini melahirkan pengaturan mengenai alat bukti yang sudah akui mengenai alat bukti elektronik seperti informasi, data dan dokumen elektronik. Pengaturan mengenai alat bukti tersebut terletak pada Pasal 27.

Pasal 27 : Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ;dan
- c. data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - (a) tulisan suara, atau gambar
 - (b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
 - (c) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lahirnya perundang-undangan ini mirip dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana sumber-sumbernya banyak didapat dari hukum internasional. Sumber paling kuat adalah Protokol PBB tahun 2000 yang sering disebut Protokol Palermo. Sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang atau yang sering disebut dengan *trafficking* bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan KUHAP. Pasal 28 menyebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Terkait dengan sifat dari kejahatan ini yang merupakan kejahatan terstruktur dan *transnational*, masalah pembuktian sudah mengatur alat bukti yang berbeda dengan pembuktian dalam hukum pidana konvensional. Perundang-undangan khusus ini sudah mengadopsi beberapa alat bukti seperti elektronik maupun dokumen

yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP

Pasal 29 : Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - (a) tulisan, suara, atau gambar;
 - (b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - (c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan

seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan

bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat

bukti yang sah lainnya.

**5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasal 54 menyebutkan “*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*”. Pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang ini tidak mencakup hal-hal yang baru. Hanya ada sedikit perbedaan atau tepatnya penguatan berupa pengaruh gender yang kuat yang dalam hal ini adalah dalam perlindungan korban.

Pasal 55 dalam undang-undang ini menyebutkan, “*Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.*”

**6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Permasalahan yang secara umum terjadi dalam penanganan kasus kejahatan berbasis teknologi informasi dan *transborderless* adalah masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam hukum pidana konvensional tidak mengenal bukti-bukti elektronik seperti *e-mail, digital file, electronic file* dan lain-lain.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini

merupakan terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti. Undang-Undang ini cukup menjawab dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini adalah *cybercrime* dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik⁴¹.

Pasal 1 angka 1 : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya⁴².

⁴¹http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_11.pdf

⁴²<https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian/>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Perkembangan Alat Bukti pada Pembuktian Tindak Pidana dalam Ketentuan KUHAP dan Perundang-undangan Khusus di Indonesia

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis-nya*. Alat bukti baik pada KUHAP maupun perundang-undangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat.

Sebelum penulis membahas mengenai pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia, penulis akan membahas terlebih dahulu beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana.

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan alat bukti**

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Sepanjang sejarah, manusia dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memenuhi kehidupannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dahulu dilakukan barter untuk memenuhi kebutuhan manusia, kemudian uang digunakan, lalu sekarang uang tidak hanya digunakan secara konvensional namun dimasukkan dalam bentuk-bentuk yang lebih praktis penggunaan ataupun penyimpanannya, seperti cek, saham, surat berharga, transfer rekening dan lain-lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti yang ada. Hal ini terkait dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut di masyarakat, dan lebih khususnya oleh para pelaku tindak pidana, bahkan digunakan sebagai sarana untuk mengungkap kejahatan oleh para penegak hukum. Dewasa ini, yang paling berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti tersebut adalah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam ilmu kedokteran.

Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet, atau dengan penulisan angka, seperti *MCMXLIII* diganti dengan 1943. Lalu munculnya teknologi percetakan, teknologi elektronik seperti radio, tv, komputer mengakibatkan informasi

menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan masyarakat, antara lain dalam bidang perdagangan, pemerintahan, bahkan terhadap perilaku masyarakat (*social behaviour*) yaitu semula berbasis kertas (*paper based*) dan berkembang ke system elektronik (*electronic based*). Sekarang dan apalagi di masa-masa mendatang, kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi elektronik⁴³.

Jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan makin memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Otomatis, perkembangan teknologi ini juga akan mempengaruhi perkembangan alat bukti, misalnya penggunaannya sebagai sarana tindak pidana yang tentunya dalam pembuktiannya, seorang penegak hukum akan memerlukannya juga. Sedangkan perkembangan ilmu kedokteran akan sangat berpengaruh dalam bidang forensik.

b. Perkembangan Kejahatan dan Modus Operandi

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu

⁴³ Teknologi informasi. www.wikipedia.com (24 April 2008 Pukul 12.00 Wib)

kepolisian akan berkembang ke arah *New Dimention Of Crime, New Type Of Crime, Organize Crime, White Collar Crime, dan Terrorism*⁴⁴. Salah satu wujud *New Dimention Of Crime* atau kejahatan dengan dimensi baru dan *New Type Of Crime* adalah *Cyber crime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang pada prosesnya menggunakan teknologi informasi khususnya komputer/internet. Kehadiran Internet memang sangat banyak manfaatnya disamping mempercepat perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya.

c. Masyarakat

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman, ini dikarenakan kejahatan merupakan gejala sosiologi. Setiap perbuatan manusia dilakukan karena proses peniruan dan imitasi. Kemudian juga ada ungkapan lain yang menyatakan "*crime is product of society it self*". Perkembangan kejahatan akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya, hubungan antara perkembangan kejahatan dan masyarakat sangatlah erat, dan kaitan dengan perkembangan alat bukti pun tentunya terdapat hubungan yang cukup erat.

⁴⁴ John kane, Identifying the Links between White-Collar Crime and Terrorism
<https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/209520.pdf>, diakses pada tanggal 20 april 2003 pukul 12.30 WIB

Perkembangan alat bukti yang digunakan pada tindak pidana tentunya akan selalu terpengaruh dengan keunikan atau sifat dari masyarakat itu sendiri. Apakah bentuknya seperti penggunaan teknologi pada masyarakat, suatu budaya tertentu dalam komunitas, penerimaan alat-alat dalam aktivitas masyarakat, hingga perubahan sikap hukum dari masyarakat itu sendiri. Misalnya saja pada masyarakat modern yang sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam segala bidang dan sudah digunakannya alat pendeteksi orang dengan teknologi tinggi seperti *scanner mata*, organ, sampai DNA dalam identifikasi seseorang sebagai password, maka secara otomatis penerimaannya di masyarakat akan mempengaruhi keberadaannya sebagai suatu alat yang dapat dijadikan bukti pada suatu tindak pidana.

2. Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP

Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti dalam ketentuan KUHAP diatur secara limitative, yaitu pada Pasal 184 KUHAP.

Pasal 184 KUHAP : Alat bukti yang sah ialah

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Perkembangan alat bukti keterangan saksi di Indonesia terjadi dalam hal pemeriksaan saksi dengan menggunakan media *teleconference*. Persidangan dengan menggunakan media *teleconference* ini masih mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan kontra. Praktek yang terjadi di Indonesia, penggunaan media ini dalam pemeriksaan saksi sudah dilakukan dalam peradilan di Indonesia. Pengaturan Mengenai Perkembangan Alat Bukti pada Pembuktian Tindak Pidana dalam Perundang-Undangan Khusus di Indonesia

Lahirnya perundang-undangan khusus sebagai salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan hukum dalam penanggulangan kejahatan dengan dihadapkan pada perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah memunculkan banyak perubahan dan pembaharuan, tidak hanya secara materiil namun juga dalam hal hukum formilnya. Bentuk perundang-undangan khusus memang memungkinkan untuk menggabungkan hukum materiil dan formil dalam satu undang-undang, dan hal tersebut dianut dalam berbagai undang-undang khusus di Indonesia. Hanya saja, dikarenakan pengaturan mengenai hukum formil undang-undang khusus pada dasarnya belum ada yang mengatur secara lengkap, maka penggunaannya masih bersifat *lex specialis derogat lex generalis* terhadap KUHP.

Beberapa perbedaan ataupun hal-hal khusus yang diatur didalamnya bisa meliputi dari penyelidikan hingga proses persidangan tindak pidana. Misalnya adanya perbedaan pengaturan lamanya masa penahanan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang lebih lama dibanding KUHAP, pengaturan jumlah hakim pada penanganan pada persidangan khusus tindak pidana korupsi dan peradilan hak asasi manusia berat, hingga pengaturan mengenai alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP. Begitu banyaknya undang-undang khusus tindak pidana di Indonesia, namun pengaturan mengenai alat bukti yang berbeda dari KUHAP hanya ditemukan beberapa, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut bahasan pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan khusus tersebut.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Pengaruh yang paling besar dalam perkembangan alat bukti pada perundang-undangan ini adalah perkembangan kejahatan dan karakteristiknya berupa modus operandi dari tindak pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi sendiri terkait dengan berbagai bidang, seperti administrasi, perpajakan, birokrasi, pemerintahan, akuntansi, bahkan terkait dengan bidang perbankan juga. Dalam tabel berikut dapat dilihat lebih jelas mengenai macam- macam modus operandi pada tindak pidana korupsi.

Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 :

Pasal 26A : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk

sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Pengertian terorisme dalam UU No 15 tahun 2003

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme terdiri dari:

- 1) Karakteristik organisasi yang meliputi : organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional.
Karakteristik operasi yang meliputi : perencanaan, waktu, taktik dan kolusi.
- 2) Karakteristik perilaku : motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup.
Karakteristik sumber daya: latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi. Motif terorisme: rasional, psikologi dan

budaya.⁴⁵

Sesuai karakteristik di atas, terorisme yang merupakan tindak pidana terorganisir, dan juga melewati batas negara, maka dalam pembuktiannya akan sangat sulit. Secara gamblang dalam UU no 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, menyebutkan mengenai alat bukti diatur juga mengenai alat bukti baru. Pengaturan tersebut ada pada Pasal 27 UU no 15 tahun 2003.

Pasal 27 : Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
- c) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada :
 - (1) tulisan suara, atau gambar
 - (2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
 - (3) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang

⁴⁵ Abdul, Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif agama, HAM, dan Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2004, hlm. 33.

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Pengaturan alat bukti dalam undang-undang ini mengakui alat bukti informasi dan dokumen yang serupa dengan yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Trafiking pertama kali dikemukakan pada tahun 2000 ketika majelis umum perserikatan bangsa-bangsa menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum trafiking pada manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, sebagai suplemen konvensi PBB untuk memerangi kejahatan terorganisasi lintas bangsa atau yang sering disebut sebagai Protokol Palermo⁴⁶.

Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu pendorong lahirnya undang-undang ini adalah keberadaan Protokol Palermo tersebut, dan yang juga merupakan salah satu sumber dari

⁴⁶Ahirul habib padilah, <https://www.scribd.com/doc/316206011/Kebijakan-Dan-Upaya-Indonesia-Dalam-Mengatasi-Kejahatan-Transnasional>, di akses pada tanggal 06 mei 2016 pukul 10.22 WIB

perundang-undangan ini.

Definisi trafiking menurut Pasal 3 Protokol Palermo adalah sebagai berikut :

- 1) Trafiking pada manusia berarti perekrutan, pengiriman ke satu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara- cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.
- 2) Persetujuan korban trafiking pada manusia atas eksploitasi yang dimaksud pada sub ayat a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana sebagaimana dimaksud pada sub-ayata).
- 3) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai 'trafiking pada manusia' meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub-ayat a) pasal ini.
- 4) 'anak' berarti seseorang yang berusia di bawah delapan

belas tahun.⁴⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara khusus sudah mengatur beberapa alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP. Senada dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003, pengaturan alat bukti pada perundang-undangan ini sudah mengakui alat bukti elektronik maupun dokumen yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Hal ini, sekali lagi, berkaitan dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, dimana apabila hanya menggunakan pengaturan alat bukti dalam KUHAP saja tidak akan dapat mencukupi, seperti halnya alat bukti keterangan saksi, tentunya akan sulit didapat selain pada saksi korban, kemudian tindak pidana ini dilakukan melalui proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang yang tidak hanya dalam teritorial lokal namun juga lintas negara, sehingga dokumen-dokumen perjalanan merupakan salah satu bukti penting, demikian sehingga diatur oleh undang-undang ini.

⁴⁷Modul panduan trafficking untuk kejaksaaan, 2005, hlm.4

**d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Secara internasional telah disepakati definisi tentang kekerasan terhadap perempuan (*Jender based violence*), yaitu sesuai Pasal 1 deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan PBB 1993 "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, dianggap perlu, dan hal inilah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Proses beracara dalam undang-undang ini bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan KUHP hal ini dapat dilihat pada Pasal 54 yang menyebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Dalam hal pemeriksaan di persidangan, pada undang-undang ini mendapat pengaruh jender yang kuat terutama dalam hal perlindungan bagi korban yaitu dalam hal :

- 1) diperbolehkannya relawan pendamping dan penasehat hukum korban untuk mendampingi korban di setiap tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan dipengadilan.
- 2) diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 3) laporan tertulis hasil pemeriksaan korban berupa visum et repertum atau surat keterangan medis/rekam medis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Khususnya mengenai pengaturan alat bukti dalam undang- undang ini, pada dasarnya tidak mencakup pengaturan alat bukti yang baru. Hanya ada sedikit perbedaan atau tepatnya penguatan dari KUHAP. Pengaturan tersebut ada dalam

Pasal 55

Pasal 55 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya .

Penjelasan Pasal 55 : Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa.

**e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang disebut dengan teknologi *cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi, internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem ini memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara.

Persoalan yang mengemuka atas perkembangan teknologi informasi ini adalah munculnya bentuk penyalahgunaan teknologi. Berbagai bentuk penyalahgunaan

tersebut dapat terlihat dari berbagai kasus yang timbul sebagai akibat penggunaan perangkat teknologi. Perusakan data, pencurian barang, hingga penyebaran informasi asusila dengan media teknologi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan terobosan terbaru, tidak hanya di bidang hukum untuk mengatasi *cyber crime*, namun juga berupa terobosan dalam perkembangan alat bukti. Perundang-undangan ini cukup menjawab dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi, yaitu mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Pengundangan Undang-undang ini oleh pemerintah, akan berdampak besar pada penegakkan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan komputer atau *cyber crime*. Walaupun sepintas pengaturan mengenai alat bukti pada Undang-Undang ini kurang- lebih sama dengan pengaturan pada undang-undang khusus lainnya yang terkait mengenai dokumen dan informasi elektronik, namun dengan cakupan tindak pidananya yang luas, yaitu terhadap semuatindak pidana yang berhubungan dengan komputer, bahkan hingga pada aspek HKI (hak kekayaan intelektual) juga, menyebabkan urgensinya pengundangan RUU

ini. Secara umum, pada perundang-undangan khusus lainnya yang sudah mengatur alat bukti elektronik maupun dokumen, hanya dapat digunakan pada tindak pidana tertentu saja, sesuai perundang-undangan tersebut.

B. Implikasi Yuridis Perkembangan Alat Bukti dalam KUHAP dan Perundang-undangan Khusus di Indonesia

Perkembangan alat bukti dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus yang telah penulis bahas pada bahasan sebelumnya merupakan suatu bentuk kemajuan hukum dalam pencarian kebenaran materiil, namun di sisi lain juga menimbulkan implikasi yuridis dalam penggunaannya. Limitasi alat bukti pada pengaturan dalam Pasal 184 KUHAP merupakan hal mutlak dengan dihadapkan pada kedudukan KUHAP sendiri sebagai *lex generalis* dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini membuat perkembangan alat bukti dalam KUHAP tidak dapat terlepas dari pengaturan Pasal 184 KUHAP. Masalah yang timbul kemudian adalah perkembangan alat bukti yang ada pada saat ini, banyak yang belum diatur secara jelas dalam KUHAP, dan menimbulkan kontroversi penerimaan oleh para penegak hukum dengan ketiadaan dasar hukum yang jelas dalam penggunaannya.

Cara untuk melegalkan penggunaan alat bukti yang belum jelas dan menjadi dasar penggunaan alat bukti dipersidangan berpegang pada empat (4) hal yaitu kebiasaan praktek persidangan yang telah ada baik dalam

penegakkan hukum di Indonesia maupun Internasional, yurisprudensi atau putusan sebelumnya yang mengatur mengenai penggunaan alat bukti, instrumen yang dikeluarkan Mahkamah Agung berupa Surat Edaran MA maupun Putusan Mahkamah Agung mengenai pengakuan maupun pengaturan penggunaan alat bukti. Hal ini menyebabkan kurang kuatnya dasar penggunaan alat bukti baru, dan pengaturan sementara itu tidak akan mampu mengakomodasi penggunaan alat bukti baru tersebut nantinya maupun perkembangan alat bukti lainnya.

Apabila benar-benar tidak ada pengaturan dalam kebiasaan praktek persidangan, yurisprudensi dan instrumen yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengaturnya, celah terakhir pada pengaturan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP berupa alat bukti petunjuk, yang sering digunakan sebagai semacam keranjang sampah guna pengaturan alat bukti yang belum ada kejelasan pengaturan dalam KUHAP. Dalam penggunaannya pun alat bukti petunjuk ada apabila sudah terdapat minimal dua alat bukti yang sah lainnya, sehingga kekuatan pembuktiannya pada dasarnya hanya sebagai pelengkap dalam persidangan. Dengan demikian alat bukti petunjuk ini tidak dapat dijadikan sarana pengaturan alat bukti yang belum diatur secara tegas dalam KUHAP, terlebih apabila dihadapkan pada keterbatasan alat bukti yang ada.

Urgensi digunakannya alat bukti baru yang belum diatur secara tegas di KUHAP menciptakan tidak hanya batasan dalam pembuktian dan juga hambatan dalam pencarian kebenaran materiil di persidangan, tentunya hal

ini tidak akan sesuai dengan tujuan dari pembuktian pidana sendiri yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil. Permasalahan mengenai alat bukti pada KUHAP yang dianggap tidak cukup lagi untuk mengakomodasi perkembangan dari kejahatan, merupakan salah satu hal yang perlu diatur lebih jauh, dan tentunya tidak akan cukup dengan kelahiran undang-undang khusus di atas. Pengaturan dari perundang-undangan khusus hanya mengikat pada pembuktian tindak pidana khusus yang diaturnya, sehingga hanya seperti jalan pintas guna mengakomodasi tidak hanya perkembangan hukum materiil, namun juga formilnya. Hal ini merupakan cara tercepat guna mengakomodasi perkembangan alat bukti di Indonesia namun juga belum merupakan jawaban terakhir untuk memberikan pengaturan yang pasti mengenai seluruh perkembangan alat bukti yang ada dikarenakan keterikatan hukum khusus terhadap hukum umum berupa *asas lex specialis derogat lex generalis*, sehingga apabila tidak ada pengaturannya akan kembali bersumber pada KUHAP sebagai hukum umumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar berbagai hal yang telah peneliti uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir penelitian ini, dapat ditarik beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

1. Beberapa perbedaan ataupun hal-hal khusus yang diatur didalamnya bisa meliputi dari penyelidikan hingga proses persidangan tindak pidana. Misalnya adanya perbedaan pengaturan lamanya masa penahanan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang lebih lama dibanding KUHAP, pengaturan jumlah hakim pada penanganan pada persidangan khusus tindak pidana korupsi dan peradilan hak asasi manusia berat, hinggga pengaturan mengenai alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP. Begitu banyaknya undang-undang khusus tindak pidana di Indonesia, namun pengaturan mengenai alat bukti yang berbeda dari KUHAP hanya ditemukan beberapa, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun

2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Implikasi yuridis mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana bahwa definisi saksi dan keterangan saksi adalah menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

B. Saran

Ketertinggalan KUHAP dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti sebagai *lex generalis* pada hukum acara pidana di Indonesia menciptakan permasalahan yang selalu timbul dalam penerapannya dengan dihadapkan pada urgensi kehadiran alat bukti baru tersebut dalam persidangan. Pendekatan hukum yang dapat dilakukan berkenaan dengan hal tersebut adalah:

- a. Pembentukan perundang-undangan khusus pada dasarnya dilandasi tiga hal. Pertama, perbuatan atau pelakunya bersifat khusus. Kedua, perbuatan tersebut bersifat temporer. Ketiga, hukum acaranya berbeda. Dengan demikian perundang-undangan khusus dapat digunakan untuk mengejar ketertinggalan hukum materiil dan hukum formil, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif tercepat dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti di Indonesia.
- b. Hakim selaku penegak hukum diharapkan untuk benar-benar aktif melakukan *recht finding* guna pencarian kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang dicari dalam pembuktian pidana, bila hal ini dapat dilakukan maka perkembangan alat bukti yang belum ada pengaturannya dapat dikuatkan oleh hakim untuk digunakan sebagai wujud *judge made law* dari hakim.
- c. Kebiasaan dalam praktek persidangan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum yang dapat digunakan untuk mengatur mengenai alat bukti baru pada persidangan tindak pidana di Indonesia. Dengan

demikian pentingnya peranan hakim dan juga perlu dikeluarkan pengaturan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi hukum di Indonesia berkenaan dengan penggunaan alat bukti baru yang belum diatur dalam hukum acara di Indonesia agar menghindari kontroversi dari penggunaannya dipersidangan.

- d. Amandemen terhadap KUHAP dibutuhkan untuk mengcover perkembangan alat bukti dan menciptakan kepastian hukum untuk mencegah konflik-konflik yang timbul berkenaan dengan adanya perkembangan alat bukti, sementara pembahasan mengenai draf RUU KUHAP baru masih berjalan dan belum diundangkan.
- e. Secepatnya diundangkan RUU KUHAP baru dan pembentukan peraturan di bawahnya untuk mengembalikan kedudukan *lex generalis* hukum acara pidana dan menciptakan keseragaman dalam pengaturan mengenai alat bukti, yang merupakan jawaban terakhir dari permasalahan mengenai alat bukti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, *Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Skripsi. Tangerang : Universitas Muhammadiyah Tangerang. 2018
- Abdul, Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif agama, HAM, dan Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar 2005
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2005
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta :Sinar Grafika, 2008
- M.YahyaHarahap, *HukumAcaraPerdata*, Jakarta: SinarGrafika, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Jakarta : Pradnya paramita, 2004
- N.H.T Siahaan, *Hukum konsumen : perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk*, Jakarta : Panta Rei, 2005
- N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- TB. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, Bandung : MQS Publishing dan AYYCCS GROUP

Jurnal/Skripsi

Abdul Kadir, *Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Skripsi. Tangerang:Universitas Muhammadiyah Tangerang.2018

Ari Dwi Wicaksono, *Permasalahan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia*, Skripsi. Jakarta :Universitas Negeri Jakarta. 2016

Cipto Sanjaya, *Tinjauan yuridis terhadap alat bukti dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2016

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Internet

<https://tugas-makalah.blogspot.com/2013/05/teori-teori-tentang-kejahatan-dan-penyebabnya.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51375eae3c7d/asas-lex-specialis-vs-lex-superior>

<https://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.html>

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_8.pdf

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2003/UU0152003.pdf>

https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_11.pdf

<https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian/>

<https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/209520.pdf>

<https://www.scribd.com/doc/316206011/Kebijakan-Dan-Upaya-Indonesia-Dalam-Mengatasi-Kejahatan-Transnasional>

Modul panduan trafficking untuk kejaksaan, 2005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Evi Apriatin
 NPM : 5116500261
 Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 21 April 1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Tambangan rt. 02/03 Kertabesuki Kecamatan
 Wanasari Kabupaten Brebes
 Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri 2 Tengki	2003	2009
2	SMP Negeri 1 Wanasari	2009	2012
3	SMA Negeri 3 Brebes	2012	2015
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2016	2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tegal, 24 Agustus 2020

Hormat saya,